

ANALISIS PETA MUTU PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI PROVINSI ACEH.

***Herliana**

*Herliana is Widyaiswara at the Acehnesse Education Quality Assurance Institution
Email: anagenabuddin@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the result of quality mapping of vocational schools as a part of the educational quality assurance in Aceh province in 2017. The school mapping has been conducted nationally for the past two years since 2016 to 2017, which in Aceh has been involving all schools in 23 districts. The quality mapping is conducted using web based instruments for respondents teachers, head teacher, students and school committee. This analysis is a comparative description of the result based on the 8 national standards of education, using five categories to meet the highest level of the standards. The results of this research showed that the quality of vocational schools in Aceh is below the national standards; including the graduates, the content of curriculum, teaching and learning process, management, teachers and education personels, infrastructure and equipment, evaluation, and finance. The content of curriculum showed the highest score 5.04, comparing with nasional 4.87. It means that the quality of vocational school in Aceh is better than the average quality of vocational schools in Indonesia, despite this is remain below the expected national standard. Nevertheless, the lowest score is the standard of teachers and education personels; 3.33. Comparing to the average score of national 2.98, the quality of vocational school of Aceh in general is better, despite this is remain below the expected quality according to the national standard.

Keywords :analysis, educational quality assurance, Vocational High School.

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan sebagai suatu mekanisme yang dijalankan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat pemerintah daerah. Adapun mekanisme sistematis ini bertujuan untuk memastikan terimplementasikannya penyelenggaraan pendidikan di seluruh proses sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Implementasi mekanisme penjaminan mutu ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan tersebut.

Pelaksanaan implementasi teknisnya, penjaminan mutu dilaksanakan dengan mengikuti tahapan-tahapan dengan siklus sebagai berikut : (1) Penetapan Standar. (2) Pemetaan Mutu. Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi; (3) Penyusunan Rencana Pemenuhan. (4) Pelaksanaan Pemenuhan Mutu. (5) Evaluasi/Audit Mutu.



Gambar 1. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan (Kemendikbud, 2016)

Tahap awal dari siklus penjaminan mutu ini adalah pemetaan mutu, yang dilaksanakan secara teknis dengan pengumpulan data dan informasi terkait 8 SNP. Dalam pemetaan mutu ini, data dan informasi dijamin dengan menggunakan instrumen tertentu yang ditetapkan secara nasional. Instrumen ini disebarkan ke seluruh sekolah di Indonesia melalui sistem dalam jaringan (daring-online) yang juga dikelola secara nasional. Adapun responden dalam penjaminan mutu ini adalah warga sekolah yang diwakili dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai panduan pemetaan mutu. Pengolahan data dilaksanakan setelah data dan informasi terkumpul

secara nasional, yang kemudian hasil pengolahan data ini divisualisasikan dalam bentuk rekapitulasi capaian 8 SNP berdasarkan capaian indikator-indikator dalam setiap standar.

Hasil pengolahan data secara nasional ini selanjutnya dikembalikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hasil persatuan pendidikan. Untuk rekapitulasi capaian di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, dapat pula dilihat dalam bentuk yang sama yang menggambarkan capaian rata-rata SNP untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dengan diperolehnya hasil pengolahan data dari peta mutu di semua tingkat kepentingan, diharapkan satuan pendidikan dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, dapat menyusun rencana tindak lanjut peningkatan mutu dan pengembangan bidang pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

Perencanaan berdasarkan peta mutu merupakan tahapan selanjutnya dalam siklus penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan perencanaan berbasis data, dapat dilaksanakan program dan kegiatan peningkatan mutu di semua tingkat; satuan pendidikan, kabupaten/kota maupun provinsi. Dalam hal ini monitoring dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mengawal implementasi yang efektif dan efisien sesuai perencanaan. Selanjutnya dibutuhkan evaluasi (audit) atas pelaksanaan program peningkatan mutu, untuk memastikan adanya kontribusi yang signifikan dari program yang diterapkan terhadap peningkatan kualitas 8 SNP. Dalam hal terjadinya peningkatan atas 8 SNP tersebut, pihak-pihak terkait dapat menetapkan target mutu baru untuk dicapai pada tahun berikutnya. Dengan demikian siklus ini merupakan alur yang berkesinambungan yang membutuhkan komitmen dari semua pihak internal maupun eksternal sehingga tujuan akhir penjaminan mutu, yaitu terciptanya budaya mutu berkelanjutan, dapat tercapai dan bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Laporan peta mutu ini merupakan analisis dari hasil pengolahan data Peta Mutu Pendidikan jenjang SMK di Provinsi Aceh untuk tahun 2016 dan 2017. Analisis ini dibutuhkan untuk mengkaji secara lebih rinci capaian standar, indikator dan sub indikator dari 8 SNP untuk dipahami secara menyeluruh makna dari nilai yang tercantum di dalam peta mutu tersebut. Data yang tercantum pada kajian ini tidak sepenuhnya cukup untuk menganalisis sebab akibat dari kondisi 8 SNP yang digambarkan, namun dapat menjadi salah satu dasar pembahasan terkait kondisi pendidikan di Provinsi Aceh. Untuk itu, penelitian lebih lanjut dengan didukung oleh data dari tingkat satuan pendidikan dan kabupaten/kota dibutuhkan untuk mengetahui tantangan yang terjadi, sehingga pada akhirnya perencanaan di bidang pendidikan dapat lebih efektif dan efisien baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi.

METODOLOGI

Data yang digunakan pada analisis peta mutu pendidikan Provinsi Aceh jenjang SMK tahun 2016 adalah dari 203 SMK dan pada tahun 2017 berasal dari 208 SMK di Provinsi Aceh yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2006 dan 2017 melalui aplikasi PMP yang dikelola oleh Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Instrumen dalam aplikasi PMP mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan yang memuat 27 indikator dan 241 sub indikator. Namun karena terjadi kendala teknis tidak semua sub indikator dapat diolah datanya.

Pada akhirnya data yang terkumpul diolah sehingga diperoleh nilai untuk setiap standar, indikator, dan sub indikator. Nilai yang muncul kemudian dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan data capaian SNP provinsi Aceh tahun 2016. Kategori yang digunakan adalah “menuju SNP 1” dengan rentang nilai 0-2.04, “menuju SNP 2” dengan rentang 2.05-3.70, “menuju SNP 3” dengan kategori 3.71-5.06, “menuju SNP 4” dengan rentang 5.07-6.66, dan “sudah SNP” dengan rentang 6.67-7.00. Pembahasan pada kajian peta mutu ini merupakan hasil analisis standar, indikator dan sub-indikator dengan melihat keterkaitan logis antarstandar dari 8 SNP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta mutu pendidikan jenjang SMK Tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa secara umum kualitas 8 SNP di SMK di Aceh berada pada kategori yang sama dengan kualitas SMK di Indonesia. Hal ini menunjukkan sebagian besar SMK di Indonesia, juga di Aceh, telah memiliki sumberdaya yang baik pada komponen manajerial maupun akademiknya, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan SNP. Untuk mendapatkan rekomendasi atas perbaikan pada standar terkait dan komponen-komponen yang menjadi prioritas perbaikan, berikut adalah pembahasan hasil peta mutu untuk jenjang SMK pada Tahun 2016 dan 2017

1. Peta Mutu SMK Provinsi Aceh Tahun 2016

Capaian setiap standar untuk jenjang SMK pada Peta Mutu 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, capaian tertinggi dari 8 SNP di Provinsi Aceh adalah pada Standar Proses (5.04) dengan kategori “menuju SNP 4”. Capaian ini bahkan lebih baik sebesar 0.53 poin dari perolehan secara nasional. Selanjutnya capaian terbaik Provinsi Aceh adalah pada Standar Isi (5.01) yang juga berada pada kualitas lebih tinggi dari kualitas SMK secara umum di tingkat nasional sebesar 0.23 poin. Standar akademik lainnya yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL dan Standar Penilaian berada pada capaian 4.97 dan 3.91.

Dibandingkan dengan capaian nasional, SKL Provinsi Aceh berada lebih tinggi 0.20 poin, sementara Standar Penilaian berada lebih rendah sebesar 0.09 poin.

Tabel 1. Capaian Nilai 8 SNP

No	Standar Nasional Pendidikan	Nasio-nal	Provinsi Aceh
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.77	4.97
2	Standar Isi	4.78	5.01
3	Standar Proses	4.87	5.04
4	Standar Penilaian Pendidikan	4	3.91
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.98	3.33
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.75	3.75
	Standar Pengelolaan Pendidikan	3.98	4.21
8	Standar Pembiayaan	3.66	3.66

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.

Adapun pada empat standar lainnya terkait manajerial SMK, capaian Provinsi Aceh juga tidak terlalu berbeda dengan capaian secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTKP pada 3.33, Standar Sarana dan Prasarana (3.75), Standar Pengelolaan Pendidikan (4.21) dan Standar Pembiayaan (3.66). Capaian Standar PTK berada lebih tinggi sebesar 0.33 poin dibandingkan capaian nasional, sementara Standar Pengelolaan Pendidikan berada lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 0.23 poin. Standar Sarpras dan Standar Pembiayaan menunjukkan capaian yang sama dengan tingkat nasional.

1.1 Standar Kompetensi Lulusan

Capaian Standar Kompetensi Lulusan untuk Provinsi Aceh, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah 4.97, berada pada kategori “menuju SNP 3”. Capaian ini merupakan nilai rata-rata dari capaian indikator SKL terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan lulusan SMK. Pada indikator terkait sikap, capaian Provinsi Aceh adalah 6.12, dilanjutkan dengan capaian terkait dimensi pengetahuan siswa pada 2.78, dan capaian terkait dimensi keterampilan siswa pada 6.02. Berikut adalah tabel yang menunjukkan capaian-capaian tersebut:

Tabel 2. Capaian Nilai Standar Kompetensi Lulusan

No	Standar/Indikator/ SubIndikator	Nilai
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.97
1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.12

1.2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	2.78
1.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.02

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.

Berdasarkan indikator-indikator di atas dapat dilihat bahwa capaian tertinggi adalah pada dimensi sikap, dilanjutkan dengan capaian pada dimensi keterampilan, dan capaian pada dimensi pengetahuan. Rendahnya capaian pengetahuan dibandingkan capaian pada dimensi lainnya akan dibahas pada bagian selanjutnya.

1.2 Standar Isi

Selanjutnya pada Standar Isi yang mencapai 5.01 (*pada kategori “menuju SNP 4”*), ditandai dengan tercapainya indikator perangkat pembelajaran (6.4).Namundemikian capaian indikator terkait pengembangan KTSP sesuai prosedur berada pada kategori “menuju SNP 3” dengan nilai 3.7. Demikian pula dengan capaian pada indikator terkait pelaksanaan kurikulum sesuai ketetapan, berada pada kategori yang sama dengan capaian 4.82.

Tabel 3. Capaian Nilai Standar Isi

No	Standar/Indikator/ Sub Indikator	Nilai
2	Standar Isi	5.01
2.1	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.4
2.2	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	3.79
2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	4.82

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016

1.3 Standar Proses

Capaian Standar Proses, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, adalah 5.04. Secara umum ini berarti bahwa kondisi pelaksanaan pembelajaran di SMK di Aceh pada umumnya sudah baik, mendekati katagori “menuju SNP 4”.Tabel di bawah ini menunjukkan nilai capaian masing-masing indikator.

Dari ketiga indikator di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai aturan mencapai 5.58 (katagori menuju SNP 4).

Tabel 4. Capaian Nilai Standar Proses

No	Standar/Indikator	Nilai
3	Standar Proses	5.04

3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	5.58
3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	5.08
3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	4.46

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016

Indikator lain yaitu proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat dan pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran mencapai masing-masing 5.08 dan 4.46 (berada pada kategori ‘menuju SNP 3’). Capaian ini menunjukkan pelaksanaan proses pembelajaran di SMK yang secara umum sudah mengikuti panduan secara nasional, walaupun belum sepenuhnya dari setiap komponen panduan tersebut dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

1.4 Standar Penilaian Pendidikan

Capaian Standar Penilaian adalah 3.91, yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikator berikut ini:

Tabel 5. Capaian Nilai Standar Penilaian Pendidikan

No	Standar/Indikator/ SubIndikator	Nilai
4	Standar Penilaian Pendidikan	3.91
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.57
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	3.68
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	3.88
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	3.43
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	3.97

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.

Secara keseluruhan capaian setiap indikator pada standar ini masih berada pada kategori “menuju SNP 3”, yaitu aspek penilaian sesuai ranah kompetensi (3.91), teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel (3.68), penilaian pendidikan ditindaklanjuti (3.88), instrumen penilaian menyesuaikan aspek (3.43), dan penilaian dilakukan mengikuti prosedur (3.97). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem penilaian di SMK di Aceh secara umum telah mengikuti panduan yang ditetapkan secara nasional, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

1.5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) diukur dengan melihat capaian dari indikator-indikator pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Capaian Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Standar/Indikator/ SubIndikator	Nilai
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.33
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.63
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	4.22
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai ketentuan	2.14

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.

Secara keseluruhan, Standar PTK mencapai 3.33 (pada kategori “mencapai SNP 3”). Namun capaian ini perlu dikaji dengan melihat capaian indikator-indikatornya, di mana indikator ‘ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan’ berada pada nilai 3.63 dan indikator ‘ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan’ berada pada nilai 4.22. Namun indikator ‘ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai ketentuan’ berada pada nilai 2.14. Hal ini menunjukkan kurangnya jumlah guru pada SMK di Aceh yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian SMK tempatnya bertugas.

1.6 Standar Sarana dan Prasarana

Capaian Standar Sarpras (3.75) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di SMK di Aceh masih belum sesuai dengan harapan SNP. Indikator ‘kapasitas dan daya tampung sekolah memadai’ mencapai nilai 3.5, yang artinya pada umumnya SMK di Aceh belum mampu menampung siswa dengan menyediakan sarana pendukung yang sesuai harapan nasional. Capaian indikator ‘sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap’ berada pada nilai 2.42, sementara capaian indikator ‘sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap’ mencapai 5.35 (pada kategori menuju SNP 4). Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum SMK di Aceh telah memiliki sebagian sarana yang ditetapkan, namun kebutuhan kelengkapan pembelajaran masih sangat kurang.

Tabel 7. Capaian Nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Standar/Indikator/ SubIndikator	Nilai
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.75
6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	3.5
6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	2.42
6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	5.35

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.

1.7 Standar Pengelolaan Pendidikan

Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan adalah 4.21 (katagori ‘menuju SNP 3’), menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sekolah untuk jenjang SMK di Provinsi Aceh telah mengikuti prosedur yang berlaku, namun masih banyak komponen dari regulasi pengeloaan SMK tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya dengan kualitas sesuai SNP. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator dari Standar Pengelolaan berikut ini:

Tabel 8. Capaian Nilai Standar Pengelolaan Pendidikan

No	Standar/Indikator/ SubIndikator	Nilai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.21
7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	4.74
7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	4.88
7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	2.89
7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	4.34

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.

Capaian pada indikator ‘sekolah melakukan perencanaan pengelolaan’ adalah 4.74, sementara capaian indikator ‘program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan’ adalah 4.88 dan inidikator ‘sekolah mengelola sistem informasi manajemen’ mencapai 4.34. Berdasarkan capaian ini, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan SMK di Provinsi Aceh telah berjalan cukup baik dengan mengedepankan perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai ketentuan. SMK di Provinsi Aceh juga pada umumnya telah mengelola sistem informasi manajemen dengan baik. Namun demikian, kinerja kepala SMK pada umumnya

masih belum sesuai harapan secara nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator ‘sekolah mengelola sistem informasi manajemen’ yang mencapai 2.89 (pada kategori ‘menuju SNP 2’). Adapun sub-indikator dari indikator terkait kinerja kepala sekolah ini, yang masih berada di kategori ‘menuju SNP 2” adalah ‘berjiwa kewirausahaan’ (2.94) dan melakukan supevisi dengan baik (2.38). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pada umumnya kepala SMK di Provinsi Aceh belum menunjukkan jiwa kewirausahaan yang berkontribusi pada perbaikan pengelolaan SMK, dan belum melakukan supervisi pembelajaran denngan baik sesuai ketentuan.

1.8 Standar Pembiayaan

Pada Standar Pembiayaan, penilaian utama adalah pada indikator terkait layanan subsidi silang, beban operaioan sekolah, dan pengelolaan dana di sekoah, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 9. Capaian Nilai Standar Pembiayaan

No	Standar/Indikator/ SubIndikator	Nilai
8	Standar Pembiayaan	3.66
8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	2.33
8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.2
8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	2.46

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2016.

Standar Pembiayaan berada pada kategori ‘menuju SNP 3’ dengan nilai 3.66. Indikator ‘beban operasional sekolah sesuai ketentuan’ mencapai 6.2, yang artinya beban operasional SMK di Provinsi Aceh sudah sesuai dengan ketentuan secara nasional. Namun SMK di Provinsi Aceh pada umumnya belum memberikan layanan subsidi silang, yang dimungkinkan karena adanya program Sekolah Gratis, di mana setiap siswa mendapat perlakuan yang sama terkait besaran dana sehingga tidak terlaksananya sistem subsidi silang dan sulitnya membebaskan sepenuhnya siswa kurang mampu. Selain itu indikator ‘sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik’ berada pada nilai 2.46, yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di SMK di Provinsi Aceh pada umumnya belum sesuai standar. Sub-indikator dengan capaian terendah pada indikator ini adalah ‘memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan’ dengan capaian 1.79. Sehingga dapat dinyatakan bahwa rendahnya capaian Standar Pembiayaan ini

adalah karena sistem pelaporan keuangan yang belum sesuai standar.

2. Peta Mutu SMK Provinsi Aceh Tahun 2017

Capaian 8 SNP berdasarkan Rapor Mutu Tahun 2017 adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Capaian Nilai 8 SNP Nasional dan Provinsi Aceh

No	Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Aceh
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.84	4.74
2	Standar Isi	4.06	3.91
3	Standar Proses	6.21	5.99
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.85	5.52
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.93	3.3
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	1.9	1.89
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.95	4.77
8	Standar Pembiayaan	5.85	5.79

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Capaian tertinggi dari SNP ini adalah pada Standar Proses dengan nilai 5.99 (menuju SNP 4), walaupun dibandingkan dengan capaian nasional, nilai ini masih lebih rendah sebesar 0.22 poin. Adapun standar dengan capaian terendah adalah Standar Sarana dan Prasarana, yaitu 1.89 (menuju SNP 1). Nilai ini bahkan lebih rendah dari capaian tingkat nasional. Berikut adalah rincian capaian setiap standar berikut indikator dan sub indikatornya.

2.1 Standar Kompetensi Lulusan

Capaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pemetaan mutu tahun 2017 menunjukkan bahwa secara umum SKL di Provinsi Aceh telah mencapai kriteria 'menuju SNP 3'. Capaian ini merupakan hasil hitung rata-rata dari capaian indikator-indikator berikut ini:

Tabel 11. Capaian Nilai Standar Kompetensi Lulusan

No	Standar/Indikator	Nilai
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.74
1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.46
1.2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	2.03
1.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	5.71

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Capaian indikator 'Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan' adalah 6.30 (menuju SNP 4) dan indikator 'Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat' berada pada nilai 6.04. Hal ini menunjukkan kualitas proses pembelajaran di SMK di Provinsi Aceh secara umum telah baik. Hal ini terlihat pula dari terimplementasinya sistem pengawasan terhadap proses pembelajaran; ditunjukkan dengan nilai 5.75 pada indikator 'Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran'.

2.2 Standar Penilaian Pendidikan

Kualitas implementasi sistem penilaian secara umum di SMK di Provinsi Aceh dapat dilihat dari capaian pada standar ini, yaitu 5.52 (menuju SNP 4). Adapun capaian setiap indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Capaian Nilai Standar Penilaian Pendidikan

No	Standar/Indikator	Nilai
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.52
4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.22
4.2	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.12
4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	5.58
4.4	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.90
4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.78

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Adapun indikator-indikator pada Standar Penilaian ini telah berada pada kategori 'menuju SNP 4, di mana indikator 'Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi' mencapai 6.22, indikator 'Teknik penilaian obyektif dan akuntabel' pada 5.12. Hal ini menunjukkan guru SMK pada umumnya telah menerapkan sistem penilaian yang sesuai dengan panduan secara nasional. Hal ini ditandai pula dengan tercapainya indikator 'Penilaian pendidikan ditindaklanjuti' dengan nilai 5.58, indikator 'Instrumen penilaian menyesuaikan aspek' pada nilai 4.80 dan indikator 'Penilaian dilakukan mengikuti prosedur' dengan nilai 5.78.

2.3 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) adalah 3.30 (menuju SNP 2). Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas PTK di SMK di Provinsi Aceh secara umum. Adapun capaian setiap indikator pada standar ini adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Standar/Indikator	Nilai
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.30
5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	4.39
5.2	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	3.34
5.3	Ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai ketentuan	2.18

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Capaian indikator 'Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan' adalah 4.39 (menuju SNP 3), demikian pula indikator 'Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan' dengan nilai 3.34 (menuju SNP 3). Hal ini menunjukkan kurang sesuainya jumlah dan kompetensi guru dan kepala sekolah di SMK di Provinsi Aceh secara umum. Hal ini terkait dengan kompetensi professional guru, serta kompetensi sosial dan manajerial kepala sekolah yang masih rendah.

2.4 Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana berikut ini menunjukkan capaian 'menuju SNP 4' pada indikator 'Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai' dengan nilai 5.11.

Tabel 14. Capaian Nilai Standar Sarana dan Prasarana

No	Standar/Indikator	Nilai
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	1.89
6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	5.11
6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	0.56
6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Nilai capaian di atas menunjukkan bahwa pada umumnya sarana dan prasarana SMK di Provinsi Aceh sudah memadai untuk

terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan daya tampung yang diatur sesuai standar nasional. Namun perlu dilakukan kajian lebih terperinci mengenai kondisi sarana dan prasarana yang secara langsung dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran berbasis kompetensi; termasuk sarana *teaching factory*, alat dan bahan praktik, dan sebagainya.

2.5 Standar Pengelolaan Pendidikan

Capaian Standar Pengelolaan adalah 4.77 (menuju SNP 3), dengan capaian indikator-indikatornya yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Capaian Nilai Standar Pengelolaan Pendidikan

No	Standar/Indikator	Nilai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.77
7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	5.83
7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.96
7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.92
7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	5.44

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017

Capaian indikator 'Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan' (5.83) dan indikator 'Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan' (5.96) menunjukkan bahwa pengelolaan SMK telah berjalan dengan baik di Provinsi Aceh, ditunjukkan dengan capaian yang masuk ke dalam kategori 'menuju SNP 4). Sekolah juga telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen dengan baik (nilai 5.44-kategori menuju SNP 4). Namun demikian kinerja kepala sekolah belum memenuhi harapan nasional, ditandai dengan tercapainya nilai 1.92 (menuju SNP 1).

2.6 Standar Pembiayaan

Capaian pada Standar Pembiayaan menunjukkan kualitas pelaksanaan sistem penilaian di SMK di Provinsi Aceh pada umumnya telah berada pada kategori 'menuju SNP 4' dengan nilai 5.79. Adapun capaian indikator-indikator pada standar ini adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Nilai Standar Pembiayaan

No	Standar/Indikator	Nilai
8	Standar Pembiayaan	5.79
8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.99
8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.65
8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.73

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017

Capaian indikator ‘Sekolah memberikan layanan subsidi silang’ (6.99) dan indikator ‘Beban operasional sekolah sesuai ketentuan’ (6.65) menunjukkan bahwa pembiayaan terhadap operasional sekolah, terutama kepada siswa kurang mampu telah berjalan dengan baik di SMK di Provinsi Aceh pada umumnya. Namun demikian pengelolaan keuangan belum sesuai dengan harapan nasional, yang ditandai dengan nilai 3.73 pada indikator ‘Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik’ (menuju SNP 3).

Pembahasan

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dinyatakan bahwa kualitas SMK di Provinsi Aceh pada umumnya belum sesuai dengan SNP untuk tahun 2016-2017. Hal ini ditunjukkan oleh tabel capaian SNP padara Rapor Mutu Pendidikan Tahun 2016 dan 2017 berikut ini.

Tabel 17. Capaian Nilai 8 SNP Tahun 2016 dan 2017

No	Standar Nasional Pendidikan	2016	2017
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.97	4.74
2	Standar Isi	5.01	3.91
3	Standar Proses	5.04	5.99
4	Standar Penilaian Pendidikan	3.91	5.52
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.33	3.3
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.75	1.89
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.21	4.77
8	Standar Pembiayaan	3.66	5.79

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat secara umum bahwa terjadi penurunan nilai pada beberapa standar dari rapor mutu 2016 pada rapor mutu 2017, yaitu pada SKL, Standar Isi, dan Standar Sarana dan Prasarana. Sementara pada Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan Pendidikan dan Standar Pembiayaan terjadi peningkatan nilai. Penurunan dan penignkatna ini perlu didiskusikan dengan meliaht seluruh standar secara menyeluruh, dengan tidak mengabaikan kondisi nyata di tingkat sekolah maupun kabupaten kota. Tabel berikut ini menunjukkan kondisi SKI berdasarkan capaian indikatornya:

Tabel 18. Capaian Nilai Standar Kompetensi Lulusan

No	Standar/Indikator /SubIndikator	2016		2017	
		Nilai	Kat	Nilai	Kat
1	Standar Kompetensi Lulusan	4.97	«««	4.74	«««
2.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.12	««««	6.47	««««
2.2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	2.78	««	2.03	««
2.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.02	««««	5.71	««««

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Capaian tertinggi pada SKL adalah pada indikator kompetensi lulusan pada dimensi sikap (6.12 pada tahun 2016 dan 6.47 pada tahun 2017), disusul capaian pada dimensi keterampilan (6.02 pada tahun 2016 dan 5.17 pada tahun 2017). Adapun capaian kompetensi siswa pada dimensi pengetahuan adalah 2.78 pada tahun 2016 dan 2.03 pada tahun 2017.

Lebih rendahnya capaian pada kompetensi pengetahuan dapat dibahas dengan melihat capaian pada standar lainnya. Berikut adalah capaian pada Isi:

Tabel 19. Capaian Nilai Standar Isi

No	Standar/Indikator /SubIndikator	2016		2017	
		Nilai	Kat	Nilai	Kat
2	Standar Isi	5.0	«««	3.9	«««
2.1	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.4	««««	4.4	«««
2.2	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	3.8	«««	5.5	««««
2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	4.8	«««	1.9	«

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Capaian di atas menunjukkan bawa perangkat pembelajaran telah disiapkan oleh guru SMK dengan kualitas yang baik, hal ini ditunjukkan dengan nilai indikator ‘Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan’ sebesar 6.4 (menuju SNP 4) pada tahun 2016. Nilai ini menurun pada tahun 2017 menjadi 4.4 (menuju SNP 3). Hal ini terjadi pula pada inidikator ‘Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan’ yang mencapai nilai 4.8 (menuju SNP 3) pada tahun 2016, menjadi 1.9 (menuju SNP 1) pada tahun 2017. Namun demikian, indikator ‘Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur’ mencapai 3.8 (menuju SNP 2) pada tahun 2016 dan

meningkat dengan nilai 5.5 (menuju SNP 4) pada tahun 2017.

Peningkatan nilai pada indikator terkait pengembangan KTSP dapat dikaitkan dengan siap dan tersedianya regulasi terkait pengembangan KTSP yang juga sudah disosialisasikan kepada SMK secara umum di Provinsi Aceh melalui pelatihan-pelatihan Kurikulum 2013. Panduan pengembangan KTSP ini tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam prosedur pelaksanaan maupun pemantauannya. Untuk itu dapat dijelaskan bawah pengembangan KTSP telah dimulai sejak terjadinya perubahan kurikulum dan telah diimplementasikan dengan baik oleh SMK di Provinsi Aceh.

Namun demikian, perangkat pembelajaran yang sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan mengalami penurunan nilai sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini perlu dikaitkan dengan kondisi perubahan Struktur Kurikulum SMK, Spektrum dan rumusan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada tahun 2015-2017, di mana perubahan ini membuat guru SMK pada umumnya mengalami kesulitan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai.

Adapun proses pembelajaran di SMK pada umumnya telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian pada kategori 'menuju SNP 4' pada semua indikator pada Standar Proses, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 20. Capaian Nilai Standar Proses

No	Standar/Indikator/ SubIndikator	2016		2017	
		Nilai	Kat	Nilai	Kat
3	Standar Proses	5.04	«««	5.99	««««
3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	5.58	««««	6.30	««««
3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	5.08	««««	6.05	««««
3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	4.46	«««	5.75	««««

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Kondisi rendahnya capaian SKL pada indikator terkait kompetensi pada dimensi pengetahuan siswa tidak didukung oleh data proses pembelajaran yang kurang sesuai. Dalam hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan lebih terfokus untuk mengetahui sebab terjadinya capaian kompetensi siswa khususnya pada dimensi pengetahuan. Kajian lebih lanjut ini adalah pada: (1) konten materi, (2) kemampuan awal siswa, dan (3) gaya belajar siswa dan gaya mengajar guru, karena ternyata proses pembelajaran yang baik menurut guru belum cukup membantu siswa secara efektif untuk mencapai kompetensi pembelajaran pada dimensi pengetahuan.

Selanjutnya untuk melihat keterkaitan capaian Standar Penilaian terhadap rendahnya

capaian SKL di atas, berikut adalah tabel capaian setiap indikator pada Standar Penilaian:

Tabel 21. Capaian Nilai Standar Penilaian Pendidikan

No	Standar/Indikator/ SubIndikator	2016		2017	
		Nilai	Kat	Nilai	Kat
4	Standar Penilaian Pendidikan	3.91	«««	5.53	««««
4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.57	«««	6.22	««««
4.2	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	3.68	««	5.12	««««
4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	3.88	«««	5.59	««««
4.4	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	3.43	««	4.91	«««
4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	3.97	«««	5.78	««««

Sumber : Laporan Peta Mutu SMK Provinsi Aceh tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat beberapa peningkatan nilai dan katagori capaian pada indikator-indikator Standar Penilaian dari tahun 2016 ke tahun 2017. Dengan capaian 6.22 (menuju SNP 4) di tahun 2017 pada indikator 'Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi' dan indikator-indikator lainnya, dapat dinyatakan bahwa prosedur penilaian di SMK telah dilaksanakan dengan baik sesuai panduan. Hal ini dimungkinkan karena telah tersedianya panduan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang dapat membantu guru secara teknik dalam menerapkan sistem penilaian pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan.

Namun demikian, dalam kajian penelusuran sebab rendahnya capaian SKL khususnya pada dimensi pengetahuan, perlu dilakukan pembahasan mengenai efektifitas sistem penilaian itu sendiri. Penerapan teknik penilaian yang akuntabel dan mengikuti prosedur serta dilakukannya tindak lanjut hasil penilaian ternyata belum cukup efektif untuk siswa mencapai kompetensi pengetahuan yang lebih baik. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan kajian terhadap: (1) kesesuaian teknik penilaian dengan metode pembelajaran, (2) ketepatan waktu dalam melakukan penilaian berbasis kompetensi dan kebutuhan siswa, (3) bentuk kegiatan tindak lanjut hasil penilaian yang lebih efektif.

Berdasarkan pembahasan di atas, pada standar-standar terkait akademik ditemukan bahwa penerapan Kurikulum 2013 telah berjalan baik di SMK di Provinsi Aceh, namun belum sepenuhnya membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Kajian lebih lanjut dibutuhkan untuk melihat kondisi pada standar-standar manajerial yaitu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(PTK), Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pendidikan, dan Standar Pembiayaan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan capaian pada Rapor Mutu 2016 dan 2017 dan perbandingan capaiannya pada dua tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi 8 SNP di SMK di Provinsi Aceh secara umum telah berjalan dengan baik. Kurikulum 2013 diterapkan dengan baik dengan proses pembelajaran dan penilaian yang baik pula. Perubahan pada beberapa komponen dari struktur kurikulum SMK terlihat memberi tantangan bagi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya capaian kompetensi siswa khususnya pada dimensi pengetahuan belum mencapai SNP sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan rencana tindak untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan SMK di Provinsi Aceh, dengan:

- 1) menganalisis rapor mutu pendidikan 8 SNP dengan data dan informasi tambahan dari observasi di tingkat satuan pendidikan,
- 2) menindaklanjuti data capaian 8 SNP pada rapor mutu dengan perencanaan peningkatan mutu di tingkat sekolah dan di tingkat Provinsi,
- 3) mensosialisasikan rapor mutu secara berkala dalam forum resmi SMK,
- 4) meningkatkan pendampingan 8 SNP di tingkat sekolah melalui kegiatan terpadu seperti sekolah model penjaminan mutu,
- 5) memastikan terbentuknya tim penjaminan mutu di tingkat sekolah dan di tingkat provinsi,
- 6) memastikan tersusunnya rencana strategi peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan berdasarkan data dan informasi.

Dengan tersedianya rapor mutu 2016-2017, satuan pendidikan, dalam hal ini SMK, dapat memperoleh gambaran kondisi 8 SNP di sekolah tersebut. Dengan tersedianya data yang sahih, sekolah dapat menentukan menganalisis kebutuhan prioritas sekolah untuk menentukan rencana tindak lanjut yang lebih efektif dan efisien. Untuk memastikan keterkaitan antarstandar secara lebih rinci dan mengkaji latar belakang kondisinya, perlu dilakukan investigasi dan penelitian lebih lanjut dengan didukung data dan informasi di tingkat satuan pendidikan dan di tingkat kabupaten/kota.

Untuk itu besar harapan LPMP Provinsi Aceh untuk terlaksananya kegiatan pemetaan mutu yang lebih sistematis di tingkat satuan pendidikan pada tahun-tahun mendatang sehingga data yang merupakan data yang *valid* dan *reliable*. Pada akhirnya LPMP Provinsi Aceh mengapresiasi setiap dukungan dan peran serta semua pihak sehingga terwujudnya peta Mutu Pendidikan, khususnya jenjang SMK dan mengharapkan tersusunnya rencana tindak lanjut peningkatan mutu yang dapat

diimplementasikan secara lebih efektif dan efisien di tingkat sekolah maupun provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Pedoman Umum Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Kemdikbud. Jakarta.
- Kemdiknas. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Sekolah/Madrasah*. Kemdiknas. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah*. Kemdiknas. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan*. Kemdiknas. Jakarta.